

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sustainability telah menjadi isu yang sering dibahas selama dua dekade terakhir (Caesaria & Basuki, 2017). Banyak yang berpandangan bahwa perusahaan harus dinilai tidak hanya berdasarkan keberhasilan ekonomi dan kinerja keuangan saja, tetapi juga berdasarkan tindakan atau perilaku yang dilakukan terhadap lingkungan dan masyarakat (Abu Qa'dan & Suwaidan, 2019). Hal ini berarti perusahaan diharuskan untuk menyeimbangkan antara kegiatan operasional yang dilakukan dengan dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Akibatnya, *sustainability report* menjadi hal penting bagi perusahaan agar dapat lebih transparan mengenai risiko dan peluang yang dihadapinya, serta untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholder*.

Sustainability report telah diterapkan sejak tahun 2000 dengan pedoman yang digunakan yakni *Global Reporting Initiative* (GRI). Hingga tahun 2017, baru ada 97 perusahaan di Indonesia yang telah melakukan pelaporan keberlanjutan berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) (Majalah CSR.id, 2017). Pedoman ini digunakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimana *sustainability report* diposisikan sebagai laporan tambahan atas laporan keuangan (Caesaria & Basuki, 2017).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengatur Laporan Keberlanjutan di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) mewajibkan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menyusun Laporan Keberlanjutan. Pasal 12 ayat (1) mewajibkan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Pasal 13 menyebutkan apabila LJK, Emiten bukan LJK, dan Perusahaan Publik bukan LJK melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

Gambar 1. Sustainability Disclosure ASEAN



Sumber: ASEAN CSR Network, (2018)

Pada tahun 2018 terdapat sebuah riset mengenai praktik pelaporan keberlanjutan yang dilakukan terhadap lima negara ASEAN, yaitu Filipina, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Berdasarkan gambar di atas, Indonesia berada di urutan ke 5 atau terakhir dengan tingkat pelaporan keberlanjutan sebesar 53,6%, sedangkan Filipina berada di urutan keempat dengan 56,3%, Thailand berada di urutan ketiga dengan 60,0%, dan Singapura berada di urutan kedua dengan 61,7%. Malaysia memiliki tingkat pelaporan keberlanjutan paling tinggi, yaitu 64,5%. Hal ini berarti membuktikan bahwa masih sangat sedikit perusahaan-perusahaan di berbagai sektor di Indonesia yang menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap permasalahan lingkungan dan sosial melalui pelaporan keberlanjutan.

Sedikitnya jumlah perusahaan yang melaporkan *sustainability report* di Indonesia dikarenakan sanksi atas perusahaan yang melanggar peraturan masih sebatas sanksi administratif dan fokusnya pun hanya pada kondisi dimana perusahaan tidak melaporkan *sustainability report*. Padahal, perusahaan yang beroperasi pada sektor sensitif bisa saja memiliki dampak yang sangat material (Dayan, 2020). Selain itu, bisa juga disebabkan karena kurangnya regulasi yang pasti atau *single definition* dari *sustainability report* yang dapat diterima secara

umum serta peraturan yang kuat yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkannya seperti saat perusahaan mempublikasikan laporan keuangan, sehingga sebagian besar perusahaan lebih memilih untuk tidak mengungkapkan laporan keberlanjutan (Qomariah, 2021).

Menurut data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui sistem SPE-IDXNet membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan *sustainability report* masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 30 Desember 2021 sejumlah 766 perusahaan namun hanya 154 perusahaan atau sekitar 20% yang melakukan pengungkapan *sustainability report* (MajalahCSR.id, 2022). Padahal sejak dikeluarkannya POJK Nomor 51/POJK.03/2017, *sustainability report* sudah bersifat wajib untuk seluruh perusahaan publik. *Sustainability report* sendiri terus mengalami peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkannya, namun apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia masih tergolong rendah dalam menjalankan pengungkapan *sustainability report*.

Hal tersebut didukung dengan masih adanya beberapa masalah terkait dengan pengungkapan *sustainability report* sebagai akibat dari adanya tuntutan para *stakeholder* terhadap informasi lingkungan dan sosial. Salah satunya karena ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang terjadi pada PT Siantar Top Tbk. tahun 2021, dimana perusahaan telah melakukan pencemaran air hasil dari pembuangan limbah perusahaan yang menyebabkan bau tidak enak dan mengganggu lingkungan. Limbah tersebut dibuang ke sungai dekat pemukiman masyarakat dan menyebabkan air sungai menjadi tercemar. Selain itu, dampak dari aktivitas perusahaan juga menyebabkan polusi udara akibat dari corong pembuangan asap. Hal ini mengganggu aktivitas masyarakat sehingga masyarakat menilai bahwa PT Siantar Top Tbk telah lalai dan tidak taat. Oleh karena itu, masyarakat melakukan protes kepada perusahaan dan melaporkan PT Siantar Top Tbk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (Lou, 2021).

Kasus lainnya, yaitu terjadi pada perusahaan produsen susu PT Greenfields Indonesia. Pada tahun 2021, perusahaan terbukti telah melakukan pencemaran

lingkungan akibat pembuangan limbah kotoran sapi yang tanpa melalui proses pengolahan. Akibatnya, selama musim hujan, perkebunan masyarakat tercemar oleh limbah kotoran tersebut. Bukan hanya perkebunan masyarakat saja, namun sungai yang berada di lingkungan sekitar juga ikut tercemar. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena meluapnya bak-bak penampungan limbah yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat menuntut PT Greenfields Indonesia atas kasus pencemaran lingkungan (Riady, 2022).

Dengan masih rendahnya pengungkapan *sustainability report* di Indonesia, diduga dapat disebabkan karena sejumlah faktor. Salah satunya, yaitu karena struktur kepemilikan saham perusahaan. Adanya perbedaan jumlah pemilik saham perusahaan merupakan dasar munculnya struktur kepemilikan. Kepemilikan saham tersebut bisa dimiliki oleh pihak internal perusahaan, institusi (badan) lain, masyarakat luas, investor asing maupun pemerintah. Struktur kepemilikan saham meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing (Susadi & Kholmi, 2021).

Dilihat dalam laporan tahunan PT Greenfields Indonesia, tidak terdapat kepemilikan saham manajerial dan saham asing sedangkan untuk PT Siantar Top Tbk tidak memiliki kepemilikan saham asing. Padahal hal tersebut dapat memengaruhi pengungkapan *sustainability report* suatu perusahaan. Sebab semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial, akan membuat manajemen semakin termotivasi untuk memaksimalkan kinerjanya yang akan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan melalui *sustainability report* (Rahmat, 2022). Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan membuat semakin ketat pengawasan kepada manajemen dengan tujuan agar manajemen tidak melakukan tindakan kecurangan dalam hal mengungkapkan *sustainability report* (Susadi & Kholmi, 2021). Kepemilikan asing dinilai dapat memengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report* karena investor asing sangat memperhatikan isu-isu mengenai lingkungan dan sosial sehingga memungkinkan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report* (Rahmat, 2022).

Faktor lainnya yang diduga dapat memengaruhi pengungkapan *sustainability report* ialah *political visibility*. PT Siantar Top Tbk dan PT Greenfields Indonesia memiliki biaya pengungkapan yang tidak terlalu besar. Apabila dilihat berdasarkan karakteristik/tipe industrinya, PT Greenfields Indonesia Tbk dan PT Siantar Top Tbk termasuk ke dalam kategori perusahaan *high profile*. Dapat dikatakan demikian karena aktivitas operasional yang dilakukan oleh kedua perusahaan berpotensi tinggi bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat luas sehingga apabila terjadi kelalaian, dapat berakibat fatal terhadap lingkungan maupun masyarakat. Sehingga untuk mengatasinya, perusahaan mengeluarkan biaya untuk melaporkan aktivitas operasional yang telah dilakukan dan dampaknya melalui pengungkapan *sustainability report* (Kartika & Yuyetta, 2020). Perusahaan yang termasuk kategori *high profile* akan lebih maksimal dalam melakukan pengungkapan terkait dengan lingkungan dan sosialnya.

Berdasarkan penelitian (Setyawan *et al.*, 2018), (Susadi & Kholmi, 2021), dan (Nuraeni & Darsono, 2020) kepemilikan manajerial secara signifikan negatif memengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Kepemilikan saham manajerial yang besar akan membuat semakin besar pula tindakan manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, atau dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan akan semakin rendah, sehingga pengungkapan laporan keberlanjutan akan semakin sedikit. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian (Latifah *et al.*, 2019), (Ardiani *et al.*, 2022), (Mujiani & Nurfitri, 2020), dan (Rahmat, 2022) yang membuktikan kepemilikan manajerial tidak memengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Riset (Masud *et al.*, 2018) dan (Bae *et al.*, 2018) membuktikan kepemilikan institusional memengaruhi pengungkapan *sustainability report* secara signifikan positif. Tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi mengarah pada ketatnya pengawasan terhadap manajemen, sehingga akan mendorong perusahaan untuk lebih banyak dalam memberikan informasi terkait lingkungan dan sosialnya melalui pengungkapan *sustainability report*. Akan tetapi, penelitian (Setyawan *et al.*, 2018) dan (Rahmat, 2022) menunjukkan hasil kepemilikan institusional tidak memengaruhi *sustainability report*.

Penelitian (Masud *et al.*, 2018) dan (Bae *et al.*, 2018) menunjukkan variabel kepemilikan asing memengaruhi pengungkapan *sustainability report* secara positif. Investor asing sangat peduli dan memperhatikan isu-isu mengenai lingkungan dan sosial sehingga dapat memengaruhi manajemen perusahaan di Indonesia untuk lebih banyak mengungkapkan informasi dalam pengungkapan *sustainability report*. Namun, penelitian (Rahmat, 2022) memberikan hasil variabel kepemilikan asing tidak memengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Dari penelitian (Subagio, 2016) proksi dari *political visibility* yaitu tipe industri memberikan hasil yang secara signifikan mengarah positif pada pengungkapan *sustainability report*. Hal ini membuktikan perusahaan kategori *high profile* memiliki dampak lingkungan yang signifikan sehingga perusahaan akan memberikan informasi lebih banyak terkait dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan pada penelitian (Kartika & Yuyetta, 2020), *political visibility* yang menggunakan proksi tipe industri tidak memengaruhi *sustainability report*.

Berdasarkan fenomena serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, menjadikan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan pengujian kembali terkait variabel yang memengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari (Masud *et al.*, 2018) dan (Sriningsih & Wahyuningrum, 2022). Kontribusi peneliti adalah dengan menambahkan variabel independen *political visibility* yang mana belum banyak diteliti sebelumnya. Peneliti menggunakan sampel, yakni seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021 dengan alasan karena dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, setiap perusahaan pasti menghasilkan dampak baik terhadap lingkungan maupun sosialnya dan juga semenjak dikeluarkannya peraturan mengenai *sustainability report*, seluruh perusahaan publik diwajibkan untuk membuat *sustainability report*. Dengan begitu, peneliti membuat judul penelitian, yaitu **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Political Visibility* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan pada uraian latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah *political visibility* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *sustainability report*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *political visibility* terhadap pengungkapan *sustainability report*

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta mengembangkan pengetahuan terkait dengan *sustainability report*. Bagi para akademisi, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat terhadap perkembangan

ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi tentang bagaimana struktur kepemilikan dan *political visibility* memengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

2. Bagi Investor

Dalam pengambilan keputusan investasi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan. Selain itu, investor juga bisa mengamati aktivitas apa saja yang dijalankan oleh perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

3. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi salah satu referensi untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengungkapan *sustainability report* di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Digunakan sebagai sumber informasi agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report*.